

2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN
PEMALANG**



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

KECAMATAN PEMALANG

TAHUN 2021 - 2026



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR **38** TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026 .**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada RPJMD.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/ atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. pedoman penyusunan Renja PD;
- b. bahan penyusunan rancangan RKPD dan KUA-PPAS.

Pasal 4

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas rencana strategis seluruh perangkat daerah;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/ atau unsur penunjang urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka dilakukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD dalam periode yang sama.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum utama penyusunan Renstra PD antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
 11. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Pembentukan Unit Pelaksana Teknis atau nama lainnya pada Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Dokumen Renstra PD Kabupaten Pematang yang ditetapkan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Dinas Lingkungan Hidup;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
19. Dinas Tenaga Kerja;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
21. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Pertanian;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
25. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
26. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
28. Kecamatan Pematang;
29. Kecamatan Taman;
30. Kecamatan Petarukan;
31. Kecamatan Ampelgading;
32. Kecamatan Comal;
33. Kecamatan Ulujami;
34. Kecamatan Bodeh;
35. Kecamatan Bantarbolang;
36. Kecamatan Randudongkal;
37. Kecamatan Moga;
38. Kecamatan Warungpring;
39. Kecamatan Pulosari;
40. Kecamatan Watukumpul;
41. Kecamatan Belik.

BAB III PENUTUP

Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pematang Jaya, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Kabupaten Pematang Jaya yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni".

BUPATI PEMATANG JAYA,



MUKTI AGUNG WIBOWO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Pemalang Tahun 2021 – 2026.

Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Pemalang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pemalang selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Namun demikian kami berharap Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Pemalang, 24 September 2021



SUHIRMAN, S.Sos.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19671213 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PEMALANG.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Pemalang... ..	II-1
2.2 Sumber Daya Kecamatan Pemalang	II-12
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang	II-19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pemalang	II-26
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PEMALANG	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pemalang	III-1
3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih.....	III-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-9
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-14
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-16
BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec. Pemalang ..	IV-1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII. PENUTUP.....	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dengan terlayannya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Pemalang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Pemalang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

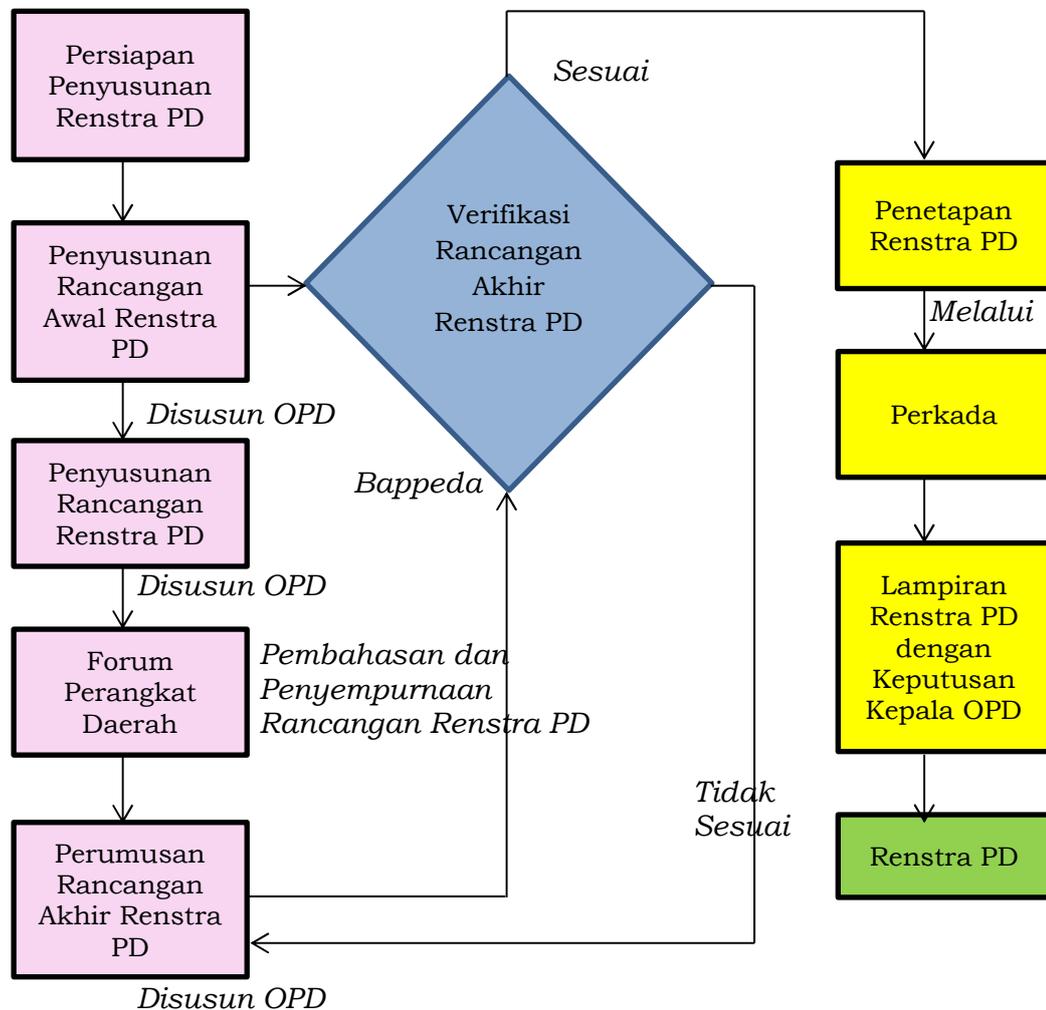
Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Pemalang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pemalang selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Pemalang, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pemalang harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026 disajikan dalam bagan berikut :

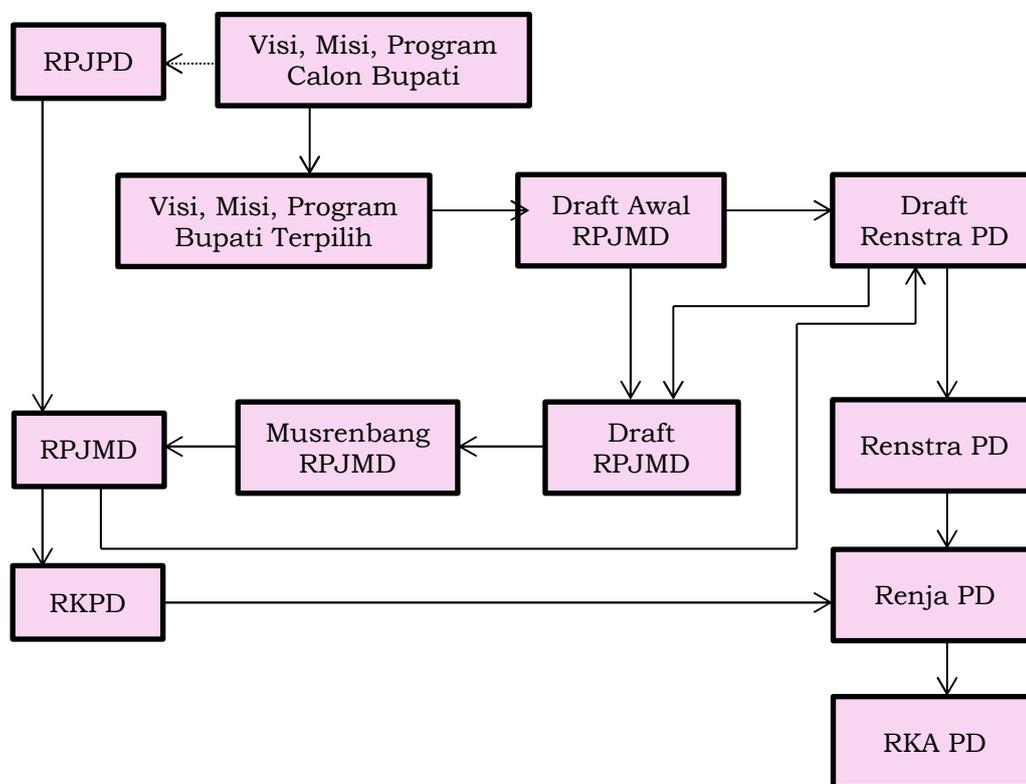
Gambar 1.1
 Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Dokumen Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Pemasang Tahun 2021-2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran

- Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 60);
 32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
 33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;

2. Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Pemalang.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Pemalang, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Pemalang, sumber daya Kecamatan Pemalang, kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pemalang.
3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Pemalang, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pemalang, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pemalang.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pemalang dalam 5(lima) tahun mendatang.
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja Kecamatan Pemalang yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
8. Bab VIII Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Pemalang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PEMALANG

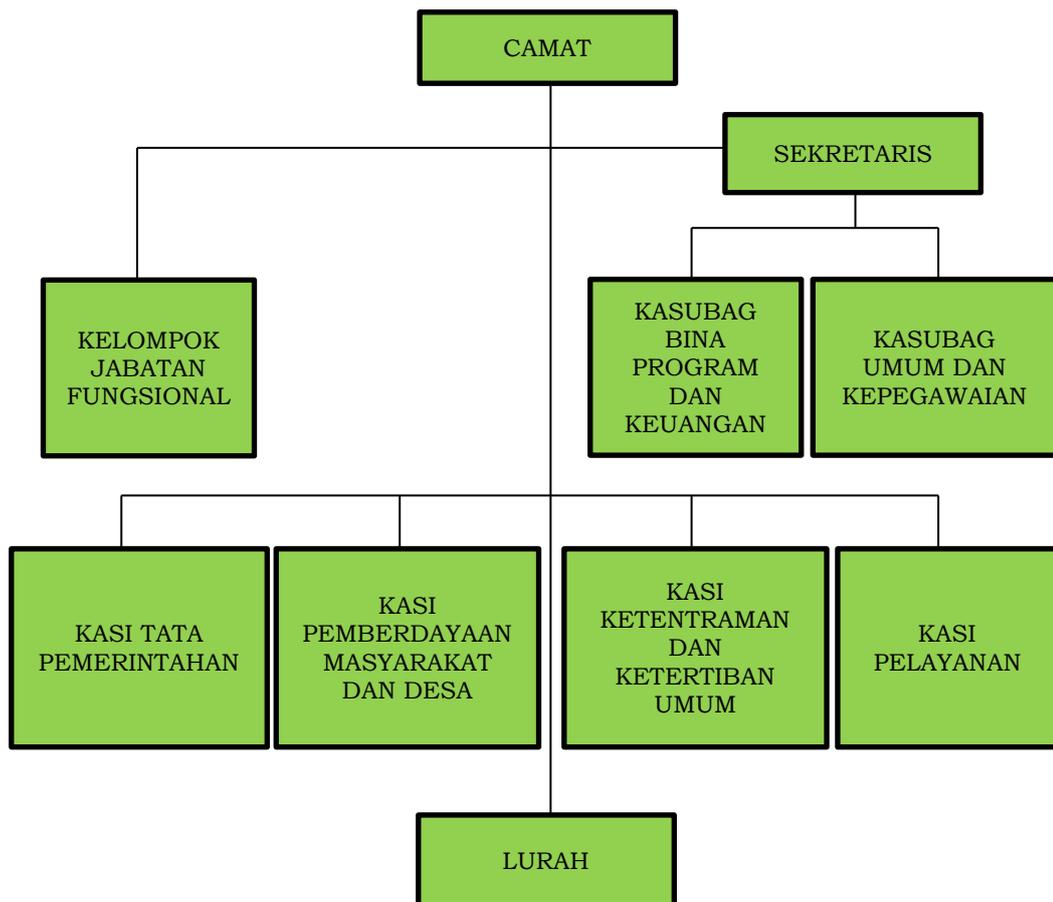
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pemalang

Kecamatan Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Pemalang



Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga

desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;

6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemuatakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
 - a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
 1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
 2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaan yang lebih

tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan

- pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
 4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
 6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data

terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;

8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan

perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi

pengaduan masyarakat, kejadian musibah, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya

- sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
 11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Pemalang

Sumber daya Kecamatan Pemalang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.

Pegawai Kecamatan Pemalang

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekcam	1	-	-	-	-	1	1
3	Kasubag	-	2	-	-	2	-	2
4	Kasi Kecamatan	3	1	-	-	4	-	4
5	JFU Kecamatan	9	5	1	7	6	-	14
6	JFT Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
7	Non ASN Kecamatan	10	5	-	-	-	-	15
8	Lurah	7	-	-	-	5	2	7
9	Seklor	2	4	-	-	6	-	6

10	Kasi Kelurahan	10	9	-	-	19	-	19
11	JFU Kelurahan	34	16	4	44	2	-	50
12	Non ASN Kelurahan	62	32	-	-	-	-	94
Jumlah		139	74	5	51	44	4	213

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pemalang, 2021

Pegawai Kecamatan Pemalang berjumlah 213 orang, meliputi 139 orang laki-laki dan 74 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Pemalang dominan laki-laki yaitu sebanyak 64,85%. Agar Kecamatan Pemalang menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak 110 orang, golongan I sebanyak 5, orang golongan II sebanyak 51 orang, golongan III sebanyak 44 orang dan golongan IV sebanyak 4 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Pemalang didominasi oleh non ASN sebanyak 51,40%. Sedangkan jika dilihat berdasar pegawai ASN, didominasi oleh pegawai bergolongan II yaitu sebanyak 49,04%.

Tabel 2.2.

Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	0
2	Diklatpim IV	25	14	11
3	ADUM	-	-	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	14	10	4
Jumlah		40	25	15

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pemalang., 2021

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Pemalang, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 25 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, dan 14 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.

Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
A. ASN :				
1	Pasca Sarjana (S2)	6	4	2
2	Sarjana (S1)	33	20	13
3	Diploma	4	1	3

4	SLTA	52	28	24
5	SLTP	6	6	0
6	SD	2	2	0
	Jumlah A	104	61	42
B.	Non ASN :			
1	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2	Sarjana (S1)	9	5	4
3	Diploma	8	3	5
4	SLTA	60	38	22
5	SLTP	9	8	1
6	SD	15	11	4
7	Tidak tamat SD	8	4	4
	Jumlah B	109	69	40
	Jumlah Total	213	130	82

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pemalang, 2021

Jumlah pegawai Kecamatan Pemalang berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 6 orang, Sarjana (S1) sebanyak 33 orang, Diploma sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 52 orang, SLTP sebanyak 6 orang dan SD sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Pemalang masih perlu ditingkatkan karena pegawai di Kecamatan Pemalang dominan berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 50%.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	0
2	IIIB	1	1	0
3	IVA	11	10	1
4	IVB	27	12	15
	Jumlah	40	24	16

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pemalang., 2021

Jumlah pegawai Kecamatan Pemalang berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 11 orang, Eselon IVB sebanyak 27 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Pemalang berdasarkan tingkat eselon dominan eselon IVB yaitu sebanyak 67,5 %.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Kecamatan Pemalang telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kecamatan Pemalang Tahun 2019 - 2020

No	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran		Realisasi		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran		URAIAN PERMASALAHAN
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	
1.	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD							
	Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD		15.760.000		15.760.000		100%	
2.	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran							
	Kegiatan Koordinasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan	41.145.000	16.510.000	40.634.250	12.205.000	98,76%	73,92%	
	Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/ kelurahan	22.000.000	19.800.000	21.344.750	19.700.000	97,02%	99,49%	
3.	Program Pengembangan kewilayahan							
	Kegiatan Penyelenggaraan Tertib Administrasi Keuangan Desa		41.700.000		37.373.500		89,62%	
No	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran		Realisasi		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran		URAIAN PERMASALAHAN

		2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat Desa/kelurahan		11.372.000		10.917.500		96,00%	
	Jumlah	63.145.000	105.142.000	61.979.000	95.956.000	98,15	91,26	

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Inventaris Aset Kecamatan Pemalang

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah					140.105.621.400
			Jumlah KIB A					140.105.621.400
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	5	5			20.850.000
		03	Alat-alat Angkutan	31	27	2	2	796.810.028
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	1			2.400.000
		05	Alat Pertanian					
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	811	795		16	1.397.889.000
		07	Alat Studia & Alat Komunikasi	15	15			76.053.570
		08	Alat-alat Kedokteran	7	7			13.585.000
		09	Alat Laboratorium					
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					
			Komputer dan printer	209	200		9	964.922.201
			Jumlah KIB B					3.272.509.799
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung	58	49	5	4	7.700.552.274
		12	Monumen	8	8			277.935.000
			Tugu kontrol	5	5			494.549.500
			Jumlah KIB C					8.473.036.774
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan	63	63			7.153.513.788
		14	Bangunan Air/Irigasi	34	34			2.739.414.166
		15	Instalasi	6	6			3.225.000
		16	Jaringan	16	16			33.349.325
			Jumlah KIB D					9.929.502.279
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan	140.058	140.058			55.280.000
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	339	339			3.734.250
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					
			Jumlah KIB E					59.014.250
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
			Jumlah KIB F					
			Jumlah Total	141.666	141.628	7	31	161.839.684.502

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pemalang, 2021

Berdasar tabel 2.5, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Pemalang masih ada barang inventaris perlu dilakukan pengadaan seperti computer dan kelengkapannya, peralatan/ perlengkapan kantor untuk mengganti barang inventaris yang rusak, pengadaan kendaraan dinas, gedung kantor/bangunan lainnya yang kondisinya sudah memprihatinkan misalnya gedung/bangunan di kelurahan widuri, sugihwaras dan kecamatan sehingga perlu direhab guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 20 desa/kelurahan di Kecamatan Pemalang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Pemalang

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Sugihwaras	8	16	48	7	54	
2	Widuri	-	8	31	11	44	
3	Pelutan	2	12	81	11	112	
4	Kebondalem	-	12	64	11	104	
5	Mulyoharjo	5	24	111	14	111	
6	Bojongbata	7	19	78	8	100	
7	Paduraksa	4	8	34	13	44	
8	Danasari	5	8	21	13	48	
9	Lawangrejo	2	4	15	9	21	
10	Tambakrejo	3	7	40	11	29	
11	Bojongnangka	6	10	52	14	19	
12	Wanamulya	4	4	22	12	20	
13	Mengori	4	4	29	10	25	
14	Sewaka	6	12	32	14	42	
15	Saradan	2	3	15	9	16	
16	Pegongsoran	3	3	27	11	20	
17	Sungapan	3	6	25	11	30	
18	Kramat	2	2	14	10	20	
19	Surajaya	6	10	52	11	32	
20	Banjarmulya	7	14	49	13	42	
	Jumlah	79	186	840	223	932	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pemalang, 2021

Kecamatan Pemalang terdiri dari 13 desa dan 7 kelurahan, 840 RT dan 186 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 932 personil Linmas.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.8.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai LKJIP	Nilai				31 (C)	40 (C)	50,01 (CC)	50,01 (CC)	50,01 (CC)	18,57 (D)	33 (C)	Na	Na	36,73 (C)	59,90	82,50	-	-	73,45
2	Persentase penyerapan anggaran	%				96	96	96	96	96	99,34	98,56	98,68	99,19	99,09	103,48	102,67	102,79	103,32	103,22
3	Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa	%				85,14	99,34	99,57	99,71	100	99,34	99,43	100	100	100	116,68	100,09	100,43	100,29	100
4	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%				70	76	76	84	84	70	76	76	77	77	100	100	100	91,67	91,67
5	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%				83	83	83	83	83	91	92	93	100	100	109,64	110,84	112,05	120,48	120,48
6	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%				83	83	83	83	83	95	96	97	100	100	114,46	115,66	116,87	120,48	120,48
7	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik	%				76,29	82,86	91,71	94,43	100	80,86	91,71	95	100	100	105,99	110,68	103,59	105,90	100
8	Nilai SKM	Indeks				NA	78	78	78	78	NA	78,95	83,75	83,83	83,36	-	101,22	107,37	107,47	106,87
9	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
10	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
11	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
12	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
13	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
14	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan	bulan				NA	NA	NA	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100	100

Sumber : Kecamatan Pemalang, 2021

Berdasarkan tabel 2.8.a dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang selama tahun 2016-2020 sebagai berikut :

1. Melebihi target, meliputi :

- Persentase penyerapan anggaran
- Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam Musrenbang Desa (2016-2019)
- Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Persentase penanganan gangguan masyarakat
- Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik (2016-2019)
- Nilai SKM

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. Komitmen dari semua pihak;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
- d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.

2. Memenuhi target, meliputi :

- Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam Musrenbang Desa (2020)
- Persentase kelengkapan administrasi desa binaan (tahun 2016-2018)
- Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik (2020)
- Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia
- Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. Komitmen dari semua pihak;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
- d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi

3. Tidak memenuhi target, meliputi :

- Nilai LKJiP, yang disebabkan oleh : (1) Masih terdapat ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja; (2) Dokumen perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja belum dipublikasikan kedalam website resmi Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang; dan (3) Antara Perjanjian Kinerja dengan dokumen Renstra masih ada yang belum sinkron
- Persentase kelengkapan administrasi binaan (tahun 2019-2020), yang disebabkan oleh : (1) Masih ada beberapa desa yang kurang memahami tentang pembuatan kelengkapan administrasi desa; (2) Masih kurangnya SDM yang memadai; dan (3) Pembinaan yang kurang terjadwal.

Tabel 2.8. b

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang
Sesuai Bab II RPJMD tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase capaian PBB	%	75,09	80,7	72,4	67,36	68,88
2	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	66,67	36,67	40	40	43,33
4	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	99,34	99,43	100	100	100
5	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina	%	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
6	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	66,67	83,33	83,33	100	100
7	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	52,28	54,98	56,73	59,84	65,22
8	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah potensi konflik	kasus	2	0	1	2	0
10	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	46,15	46,15	53,84	53,84	53,84

Sumber : Kecamatan Pemalang, 2021

Persentase capaian PBB Kecamatan Pemalang selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun yaitu sebesar

75,09% pada tahun 2016 menjadi sebesar 68,88% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, sehingga kemampuan membayar PBB juga menurun.

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun, yaitu sebesar 66,67% pada tahun 2016 menjadi sebesar 43,33% pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 99,34% pada tahun 2016 menjadi sebesar 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2016-2020 stagnan, yaitu sebesar 83,33%. Dari 6 LKD hanya dibina 5 LKD yaitu RW, PKK, karang taruna, Posyandu dan LPMD/K. Sedangkan untuk RT pembinaan diserahkan kepada desa/kelurahan.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 66,67% pada tahun 2016 menjadi sebesar 100% pada tahun 2020. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 52,28% pada tahun 2016 menjadi sebesar 65,22% pada tahun 2020. Meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan masih minimnya dana kelurahan yang dialokasikan dan masih kurangnya dukungan dari PD terkait.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Pada tahun 2016, 2018 dan 2019 masih terdapat potensi konflik. Potensi konflik ini terjadi antar desa akibat adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun, potensi konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 46,15% pada tahun 2016 menjadi sebesar 53,84% pada tahun 2020. Meskipun meningkat capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Tabel 2.8. c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Pemalang, 2021

Tabel 2.8. d
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Pemalang, 2021

Tabel 2.8. e
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang Kabupaten
 Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam
 Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Pemalang, 2021

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Adminiatrasi Perkantorab	163,46	284,81	348,83	375,81	365,02	160,10	272,01	335,84	362,89	349,84	97,94	95,50	96,28	96,56	95,84	25,39	24,46
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	578,97	339,08	425,90	624,60	502,01	574,11	332,90	420,82	621,92	497,48	99,16	98,18	98,81	99,57	99,10	2,80	3,04
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,88	12,50	180,00	67,03	5,11	20,78	12,32	179,13	66,94	5,11	99,53	98,58	99,51	99,87	99,97	286,18	289,48
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran	36,40	65,50	70,50	83,50	61,03	36,38	64,61	66,39	81,99	59,02	99,94	98,63	94,17	98,19	96,70	19,78	18,96
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81						
Program peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan	612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89						
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85						
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	0,00	4.522,13	4.682,27	4.465,91	3.245,08	0,00	4.467,09	4.631,60	4.395,45	3.204,07		98,78	98,92	98,42	98,74	-9,47	-9,51
Program pengembangan kewilyahan	0,00	0,00	0,00	9.312,13	5.704,60	0,00	0,00	0,00	9.279,47	5.676,96				99,65	99,52	-38,74	-38,82
Jumlah	1.550,92	5.224,02	5.707,50	14.928,97	9.882,84	1.540,61	5.148,93	5.633,77	14.808,66	9.792,48							
Rata-rata											99,30	97,94	97,54	98,71	98,31	31,77	31,96

Sumber : Kecamatan Pemalang, 2021

Berdasar tabel 2.8, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2020 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Pemalang cenderung stabil, yaitu dengan rata-rata sebesar 99,30% pada tahun 2016 menjadi sebesar 98,31% pada tahun 2020. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Pemalang. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Pemalang selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 31,77%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 31,96%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pemalang

Kecamatan Pemalang dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang tahun 2021-2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN PEMALANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pemalang

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Pemalang sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan
			Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM
			Masih terdapat kasus pengaduan masyarakat
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat pengajuan izin non usaha
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
			Masih terdapat pengajuan surat non perizinan
2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Desa
			Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan
			Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten
		Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kelurahan
			Masih rendahnya sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
			Belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan
		Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib
			Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
			Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
6	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD
			Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan
			Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
7	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD)	Belum optimalnya penyusunan perencanaan kebutuhan BMD
			Belum optimalnya penyusunan laporan BMD
		Masih rendahnya kapasitas SDM	Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Terdapat komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang perlu diganti
			Belum tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan
			Belum tercukupinya peralatan rumah tangga yang diperlukan
			Belum tercukupinya bahan logistik kantor
			Terdapat barang yang harus dicetak dan digandakan
			Minimnya bahan bacaan yang tersedia
			Terdapat materi yang harus dikoordinasi dan konsultasikan
		Penataan arsip belum sesuai ketentuan	
		Belum tercukupinya BMD sesuai kebutuhan	Belum tercukupinya kebutuhan motor dinas
			Belum tercukupinya kebutuhan mebel
			Belum tercukupinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya
			Belum tercukupinya kebutuhan sarpras gedung kantor
			Belum tercukupinya sarpras pendukung gedung kantor
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Masih terjadi surat yang tidak terkirim atau terlambat
Terdapat kebutuhan listrik, PDAM yang harus dibayar			
Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan			

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara
			Terdapat mebel yang harus dipelihara
			Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara
			Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Pemalang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Pemalang mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat.

Berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Pemalang mendukung program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Pemalang sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Pemalang tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong

dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Pemalang, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni				
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan 9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik 6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja 7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan 6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran 7. Belum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa 6. Adanya pendampingan dari PD terkait 7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
			maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan	
Desa Wisata (Dewi) Desa Sinergi (Desi) Desa Digital (Dedi)	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2021-2026 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kecamatan Pemalang. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang

Telaahan terhadap Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pematang dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kecamatan Pematang dengan Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pematang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kemendagri merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Renstra Kemendagri tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 yang menjadi paduan pelaksanaan tugas dalam jangka waktu tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan, yaitu : (1) meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator sasaran berupa Indeks Demokrasi Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, serta indeks kinerja ormas; (2) meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah dengan indikator sasaran berupa Indeks ketahanan nasional gatra ideologi, Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM), Indeks ketahanan nasional gatra ekonomi, dan Indeks ketahanan nasional gatra sosial budaya; (3) meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran berupa Indeks kewaspadaan nasional; (4) meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran berupa jumlah

daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik, dan Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas; (5) meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran berupa persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 JP per tahun, tingkat kapabilitas auditor Kemendagri, tingkat kapasitas PPUPD secara nasional, dan Indeks kepuasan stakeholders terhadap kinerja alumni; (6) meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran berupa Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah; (7) meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif dengan indikator sasaran berupa Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM, Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik, rata-rata indeks pengelolaan keuangan daerah, persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi, jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori utama, Indeks pengawasan pemerintahan daerah, dan Indeks kapasitas Inspektorat Kabupaten; (8) terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warganegara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran berupa persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik; (9) meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan indikator sasaran berupa Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan; (10) meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri dengan indikator sasaran berupa IRB; (11) terwujudnya Kemendagri yang akuntabel dan berintegritas dengan indikator sasaran berupa Indeks pengawasan internal dan Indeks penanganan pemeriksaan khusus; dan (12) meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri dengan indikator sasaran berupa persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan.

Sasaran dari Kemendagri yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pemalang, meliputi : (1) meningkatnya

kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran berupa Indeks kewaspadaan nasional; (2) meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran berupa jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik, dan Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas; dan (3) meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan indikator sasaran berupa Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, tugas Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum; (2) meningkatnya pelayanan kinerja Satpol PP dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP; dan (3) meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran dengan indikator cakupan pelayanan kebakaran.

Sasaran dari Satpol PP yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pemalang, yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, tugas Bakesbangpol adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani; (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani; dan (3) meningkatnya pelayanan kinerja Bakesbangpol dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Bakesbangpol.

Sasaran dari Bakesbangpol yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pemalang, meliputi : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang

tertangani; dan (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, tugas Dinpermasdes adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya pelayanan kinerja Dinpermasdes dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinpermasdes; dan (2) meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya.

Sasaran dari Dinpermasdes yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Pemalang, yaitu meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya.

Tabel 3.3.

Telaah Renstra Kemendagri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Renstra Kemendagri/PD (sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Renstra Kemendagri				
1. Indeks kewaspadaan nasional 2. Jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik 3. Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan kelurahan 3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di	1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan

	<p>6. Pelayanan umum</p> <p>6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan</p> <p>8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan</p> <p>9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya</p>	<p>5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik</p>	<p>tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan</p>	<p>4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa</p>
Renstra Satpol PP				
<p>Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum</p>	<p>1. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>2. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup</p>	<p>Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p>	<p>Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p>	<p>Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p>
Renstra Bakesbangpol				
<p>1. Persentase potensi konflik sosial yang tertangani</p>	<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</p>	<p>Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan</p>	<p>Adanya perbedaan latar belakang pendidikan,</p>	<p>Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap</p>

2. Persentase potensi konflik agama yang tertangani		dan kecamatan	agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
Renstra Dinpermasdes				
Jumlah desa berdaya	1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	1. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 2. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 2. Masih rendahnya kapasitas aparat pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	1. Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 2. Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian

produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Pemalang tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi PD, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kecamatan Pemalang tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Pemalang, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra PD Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Pemalang yaitu **“Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Pemalang”**.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pemalang

Kecamatan Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

1. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Pemalang secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

4.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pemalang selama tahun 2021–2026 adalah “**Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima**”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pemalang sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

4.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pemalang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pemalang selama tahun 2021-2026, adalah “**Meningkatnya pelayanan**”

kecamatan". Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pemalang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	83,36	83,4	83,45	83,5	83,55	83,6	83,65	83,65
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	85,10	85,43	87,31	87,64	89,51	89,85	91,72	91,72

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Pemalang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Pemalang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
Misi 2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan
		2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman 2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat
		3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
		4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten 4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin
		5. Meningkatkan penanganan potensi konflik	5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa 5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam
		6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Pemalang selama tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
								23.258.91 8.000		23.263.00 0.000		139.573.91 8.000	Kecamatan Pemalang + Kelurahan	Kecamatan Pemalang + Kelurahan									
								14.242.78 9.200		14.246.87 1.200		85.477.145 .200	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang									
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	83,36	83,4		83,45		83,5		83,55		83,6		83,65		83,65			Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
	Meningkatnya pelayanan kecamatan			Cakupan layanan kecamatan	%	85,10	85,43		87,31		87,64		89,51		89,85		91,72		91,72			Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,15	58,3	943.672.000	58,5	962.921.000	58,6	962.921.000	58,7	962.921.000	58,8	962.921.000	58,9	962.921.000	58,9	7.758.277.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang	
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	36,73	37,5	12.437.187.000	38	12.438.187.000	38,5	12.438.187.000	39	12.438.187.000	39,5	12.438.187.000	40	12.438.187.000	40	74.628.122.000			

		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		269.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang	
			Keluaran kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	10	11		20		20		20		20		20					
			Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		100					
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4	3	12.000.000	3	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	3	12.000.000	2	12.000.000	2	72.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	18.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	18.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	17.500.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	17.500.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang

		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	30.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	3	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	112.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.393.187.000		12.393.187.000		12.393.187.000		12.393.187.000		12.393.187.000		12.393.187.000		74.359.122.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		1			
			Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang / Bulan	103/14	103/14	12.390.187.000	103/14	12.390.187.000	103/14	12.390.187.000	103/14	12.390.187.000	103/14	12.390.187.000	103/14	12.390.187.000	103/14	74.341.122.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	18.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		35.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	Dokumen		4		4		4		4		4		4		4			

			Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	%		100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang Tersusun	Dokumen		2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	17.500.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.03.06	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun	Dokumen		2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	17.500.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-		10.249.000		10.249.000		10.249.000		10.249.000		10.249.000		51.245.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Orang		0		25		25		25		25		25		25			
			Hasil Kegiatan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%				100		100		100		100		100		100			
		7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang / Kegiatan				25/1	10.249.000	25/1	10.249.000	25/1	10.249.000	25/1	10.249.000	25/1	10.249.000	25/1	51.745.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					221.231.200		221.232.000		221.232.000		221.232.000		221.232.000		221.232.000		1.327.392.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	4	8		8		8		8		8		8		8			

			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100					
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan		8/12	5.000.000	8/12	5.000.000	8/12	5.000.000	8/12	5.000.000	10/12	5.000.000	10/12	5.000.000	10/12	5.000.000	10/12	30.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Unit		10	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000	2	14.400.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis / Bulan		16	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	60.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis / Bulan		3/12	156.441.200	3/12	156.442.000	3/12	156.442.000	3/12	156.442.000	3/12	156.442.000	3/12	156.442.000	3/12	156.442.000	3/12	938.647.200	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis / Bulan	2	2	18.550.000	2	18.550.000	2	18.550.000	2	18.550.000	2	18.550.000	2	18.550.000	2	18.550.000	2	111.300.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Lembar	45.000	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220							
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis / Bulan	2/12	2/12	3.840.000	2/12	3.840.000	2/12	3.840.000	2/12	3.840.000	2/12	3.840.000	2/12	3.840.000	2/12	3.840.000	2/12	23.040.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	Kegiatan	5	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	120.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata	Jenis	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	30.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang	

		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				84.019.800	7	98.520.000	11	98.520.000	38	98.520.000	11	198.520.000	38	98.520.000	38	576.619.800	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	13		7		11		38		11		38		38			
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang tersedia	Unit	1	30.213.000	1	30.213.000	1	30.213.000	1	30.213.000	1	30.213.000	1	30.213.000	1	181.278.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit			3	28.000.000	3	18.000.000	30	18.000.000	3	18.000.000	30	18.000.000	30	100.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	9	40.806.800	2	20.307.000	4	30.307.000	4	30.307.000	4	30.307.000	4	30.307.000	4	222.648.800	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	Unit	1	13.000.000	1	5.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	110.000.000	3	10.000.000	3	158.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	Unit			1	15.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	55.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.921.000	3	246.420.000	3	246.420.000	3	246.420.000	3	246.420.000	3	246.420.000	3	1.448.021.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang

			Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	850	900	2.501.000	900	3.000.000	900	3.000.000	900	3.000.000	900	3.000.000	900	17.501.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar tiap bulan	Jenis / Bulan	3/12	3/12	36.420.000	3/12	36.420.000	3/12	36.420.000	3/12	36.420.000	3/12	36.420.000	3/12	218.520.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang / Bulan	15/12	15/12	177.000.000	15/12	207.000.000	15/12	207.000.000	15/12	207.000.000	15/12	207.000.000	15/12	1.035.177.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					417.500.000	79	380.500.000	80	380.500.000	80	380.500.000	82	280.500.000	83	380.500.000	83	2.220.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	36	39		79		80		80		82		83		83			
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100			

		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang beriri dan terpelihara	Unit	12	12	29.500.000	12	29.500.000	13	29.500.000	14	29.500.000	15	29.500.000	16	29.500.000	16	177.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit			40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	40	15.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	20	23	13.000.000	23	13.000.000	23	13.000.000	23	13.000.000	23	13.000.000	23	13.000.000	23	78.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	3	3	275.000.000	3	235.000.000	3	235.000.000	3	235.000.000	3	235.000.000	3	235.000.000	3	1.450.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		100.000.000	1	-	1	100.000.000	1	500.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%	71,67	73,33	79.900.000	75	75.069.200	76,67	75.069.200	78,33	75.069.200	80	75.069.200	81,67	75.069.200	81,67	455.246.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	204.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	jenis data pemerintahan yang dipublikasikan	Data	2	3		3		4		4		5		5		5			

			Hasil Kegiatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	40	60		60		80		80		100		100		100					
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang tersedia	Data	3	5	34.000.000	5	34.000.000	5	34.000.000	5	34.000.000	5	34.000.000	5	34.000.000	5	34.000.000	5	204.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					27.500.000		14.669.200		14.669.200		14.669.200		14.669.200		14.669.200		14.669.200		100.846.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus	3	3		3		3		3		3		3		3		3			
			Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	Peraturan				1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	15.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	layanan				1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5	3.000.000	5	15.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	Kasus	3	3	27.500.000	3	8.669.200	3	8.669.200	3	8.669.200	3	8.669.200	3	8.669.200	3	8.669.200	3	70.846.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang

		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	100	100	575.950.000	100	547.364.000	100	547.364.000	100	547.364.000	100	547.364.000	100	547.364.000	100	3.312.770.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			2	4	496.950.000	4	497.950.000	4	497.950.000	4	497.950.000	4	497.950.000	4	497.950.000	4	2.986.700.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa / Kel + Kec)	Orang	120	120		120		120		120		120		120		120			
			Hasil Kegiatan	Rerata dari persentase kehadiran Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Orang				25/1	4.000.000	25/1	4.000.000	25/1	4.000.000	25/1	4.000.000	25/1	4.000.000	25/1	20.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Orang	120	120	33.950.000	120	33.950.000	120	33.950.000	120	33.950.000	120	33.950.000	120	33.950.000	120	203.700.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang ab yang didampingi	Desa / Kelurahan	2	4	463.000.000	4	460.000.000	4	460.000.000	4	460.000.000	4	460.000.000	4	460.000.000	4	212.980.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					79.000.000		49.414.000		49.414.000		49.414.000		49.414.000		49.414.000		326.070.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang

			Keluaran Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang aktif	Lembaga	3	3		4	4		5	5		6	6						
			Hasil Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	%	50	50		66,67	66,67		83,33	83,33		100	100						
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	Lembaga	3	3	79.000.000	4	44.414.000	4	44.414.000	5	44.414.000	5	44.414.000	6	44.414.000	6	301.070.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Orang				40	5.000.000	40	5.000.000	40	5.000.000	40	5.000.000	40	5.000.000	40	25.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100	11.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	101.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		80.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang				30		31		32		33		33		33			
			Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%				75		77,5		80		82,5		82,5		82,5			

		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang	40	5.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	80.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		21.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya	Peraturan	2		2		2		3		3		3		3			
			Hasil Kegiatan	Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya	%	75		76		77		78		79		80		80			
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	Peraturan	2	6.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	21.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	55.300.000	100	45.330.000	100	45.330.000	100	45.330.000	100	45.330.000	100	45.330.000	100	281.950.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang

		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				55.300.000		45.330.000		45.330.000		45.330.000		45.330.000		45.330.000		281.950.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Orang		30		30		31		31		32		32		32			
			Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%		75		75		77,5		77,5		80		80		80			
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	31.300.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	181.300.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	Orang		40	6.500.000	20	3.330.000	20	3.330.000	20	3.330.000	20	3.330.000	20	3.330.000	20	23.150.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang

		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	Kasus	0	2	2.500.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	12.500.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah unsur Forkompimca m yg berkoordinasi	Tema	6	6	15.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	65.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	53,84	53,84	139.780.200	61,53	160.000.000	61,53	160.000.000	69,23	160.000.000	69,23	160.000.000	76,92	160.000.000	76,92	160.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					139.780.200		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		939.790.200	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	Desa	7	7		8		8		9		9		10		10			
			Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa / Kegiatan	13/4	13/4	15.000.000	13/4	25.000.000	13/4	25.000.000	13/4	20.000.000	13/4	25.000.000	13/4	25.000.000	13/4	135.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	Desa / Kegiatan	13/3	13/2	6.000.000	13/2	16.000.000	13/2	16.000.000	13/2	6.000.000	13/2	16.000.000	13/2	16.000.000	13/2	76.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang

		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa / Kegiatan	13/4	13/6	25.000.000	13/6	30.000.000	13/6	30.000.000	13/6	25.000.000	13/6	30.000.000	13/6	30.000.000	13/6	170.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang	
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Orang / Kegiatan		26/2	9.000.000	26/2	19.000.000	26/2	19.000.000	26/2	9.000.000	26/2	19.000.000	26/2	14.000.000	26/2	89.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang	
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	Desa								12	60.000.000				1	10.000.000	1	70.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Orang / Kegiatan		26/1	6.000.000	26/1	16.000.000	26/1	16.000.000	26/1	6.000.000	26/1	16.000.000	26/1	16.000.000	26/1	76.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang	
		7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	Surat		4	3.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	28.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang	
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	Desa / Kegiatan	13/2	13/2	6.000.000	13/2	16.000.000	13/2	16.000.000	13/2	11.000.000	13/2	16.000.000	13/2	16.000.000	13/2	81.000.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang	
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Linmas	Orang	44	44	56.780.200													Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang	

		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	Desa / Kegiatan		13/2	8.000.000	13/2	18.000.000	13/2	18.000.000	13/2	10.500.000	13/2	18.000.000	13/2	13.000.000	13/2	85.500.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	Orang / Kegiatan		26/1	5.000.000	26/1	15.000.000	26/1	15.000.000	26/1	7.500.000	26/1	15.000.000	26/1	15.000.000	26/1	72.500.000	Kecamatan Pemalang	Kecamatan Pemalang
			KELURAHAN KEBONDALEM					1.303.163.200		1.303.163.200		1.303.163.200		1.303.163.200		1.303.163.200		1.303.163.200		7.818.979.200	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					281.423.200		281.423.200		281.423.200		281.423.200		281.423.200		281.423.200		1.688.539.200	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					127.543.200		127.543.200		127.543.200		127.543.200		127.543.200		127.543.200		769.259.200	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan		5	5		5		5		5		5		5				
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang melancarkan pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100			

		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	10/12	10/12	3.000.000	10/12	3.000.000	10/12	3.000.000	10/12	3.000.000	10/12	3.000.000	10/12	3.000.000	10/12	18.000.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem		
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Unit	3	3	8.000.000	3	8.000.000	3	8.000.000	3	8.000.000	3	8.000.000	3	8.000.000	3	48.000.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	4	4	98.727.500	4	98.727.500	4	98.727.500	4	98.727.500	4	98.727.500	4	98.727.500	4	592.365.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis / Bulan	5	4	7.812.200	4	7.812.200	4	7.812.200	4	7.812.200	4	7.812.200	4	7.812.200	4	46.873.200	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem		
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Lembar	26544	15.007	7.503.500	15.007	7.503.500	15.007	7.503.500	15.007	7.503.500	15.007	7.503.500	15.007	7.503.500	15.007	7.503.500	15.007	45.021.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis / Bulan	2	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	15.000.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		75.000.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem		
				Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	3	6		6		6		6		6		6		6				
				Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100				
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit		4	4.396.000	4	4.396.000	4	4.396.000	4	4.396.000	4	4.396.000	4	4.396.000	4	26.376.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem		

		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	2	8.104.000	2	8.104.000	2	8.104.000	2	8.104.000	2	8.104.000	2	8.104.000	2	48.624.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.000.000		114.000.000		114.000.000		114.000.000		114.000.000		114.000.000		684.000.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
			Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100				
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan (jenis/bulan)	Jenis / Bulan	3	19.200.000	3	19.200.000	3	19.200.000	3	19.200.000	3	19.200.000	3	19.200.000	3	115.200.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang / Bulan	13	94.800.000	13	94.800.000	13	94.800.000	13	94.800.000	13	94.800.000	13	94.800.000	13	568.800.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.380.000		27.380.000		27.380.000		27.380.000		27.380.000		27.380.000		164.280.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	2	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
			Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100				

		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berizin dan terpelihara	Unit		2	4.380.000	4	4.380.000	4	4.380.000	4	4.380.000	4	4.380.000	4	4.380.000	4	26.280.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit		10	7.100.000	10	7.100.000	10	7.100.000	10	7.100.000	10	7.100.000	10	7.100.000	10	42.600.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	2	2	15.900.000	2	15.900.000	2	15.900.000	2	15.900.000	2	15.900.000	2	15.900.000	2	95.400.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Publik yang tersedia	%			28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		172.800.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		172.800.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
			Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Kasus		1		1		1		1		1		1		1			
			Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%		100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani [Jumlah Monitoring Dan Evaluasi PBB Yang Dilaksanakan]	Kasus [Kegiatan]		24	28.800.000	24	28.800.000	24	28.800.000	24	28.800.000	24	28.800.000	24	28.800.000	24	172.800.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem

		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%			976.690.000		976.690.000		976.690.000		976.690.000		976.690.000		976.690.000		5.860.140.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					976.690.000		976.690.000		976.690.000		976.690.000		976.690.000		976.690.000		5.860.140.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	11	15		15		15		15		15		15		15				
			Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		100		100				
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	9.900.000	100	9.900.000	100	9.900.000	100	9.900.000	100	9.900.000	100	9.900.000	100	59.400.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	4	5	645.628.000	5	645.628.000	5	645.628.000	5	645.628.000	5	645.628.000	5	645.628.000	5	3.873.768.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	321.162.000	50	321.162.000	50	321.162.000	50	321.162.000	50	321.162.000	50	321.162.000	50	1.926.972.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem	
				Jumlah laporan pelaksanaan verwal DTKS	Dokumen		1		1		1		1		1		1		1				
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	5	5		5		5		5		6		6		6				

		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Proporsitas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	10.000.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					-		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
			Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkatkan kapasitasnya	Orang			17		17		19		19		20		20				
			Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkatkan kapasitasnya	%			70		70		75		75		80		80				
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25		2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	10.000.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%		16.250.000			14.250.000		14.250.000		14.250.000		14.250.000		14.250.000		87.500.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				16.250.000			14.250.000		14.250.000		14.250.000		14.250.000		14.250.000		87.500.000	Kelurahan Kebondalem	Kelurahan Kebondalem

			Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional																				
			Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional																				%
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	16.250.000	2	14.250.000	2	14.250.000	2	14.250.000	2	14.250.000	2	14.250.000	2	87.500.000				
			KELURAHAN PELUTAN					1.369.920.200		1.369.920.200		1.369.920.200		1.369.920.200		1.369.920.200		1.369.920.200		8.219.521.200				
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					318.838.400		318.838.400		318.838.400		318.838.400		318.838.400		318.838.400		1.913.030.400				
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					143.084.100		143.084.100		143.084.100		143.084.100		143.084.100		143.084.100		858.504.600				
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan	6	6	143.084.100	6	143.084.100	6	143.084.100	6	143.084.100	6	143.084.100	6	143.084.100	6	858.504.600				

			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	10	10	2.499.400	10	2.499.400	10	2.499.400	10	2.499.400	10	2.499.400	10	2.499.400	10	14.996.400	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Unit	11	11	31.990.000	5	31.990.000	7	31.990.000	10	31.990.000	7	31.990.000	10	31.990.000	10	191.940.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	4	4	47.012.000	4	47.012.000	4	47.012.000	4	47.012.000	4	47.012.000	4	47.012.000	4	282.072.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak yang tersedia	Jenis / Bulan	3	3	13.582.700	3	13.582.700	3	13.582.700	3	13.582.700	3	13.582.700	3	13.582.700	3	81.496.200	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis / Bulan	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	18.000.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kegiatan	3	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	270.000.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.275.800		9.275.800		9.275.800		9.275.800		9.275.800		9.275.800		55.654.800	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit		3			3		3		3		3		3		3		

			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas (%)	%		100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Unit		3	9.275.800	3	9.275.800	3	9.275.800	3	9.275.800	3	9.275.800	3	9.275.800	3	55.654.800	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					127.896.000		127.896.000		127.896.000		127.896.000		127.896.000		127.896.000		767.376.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
			Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	3	3		3		3		3		3		3		3			
			Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat		400	2.700.000	400	2.700.000	400	2.700.000	400	2.700.000	400	2.700.000	400	2.700.000	400	16.200.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	(jenis/bulan)		3	17.796.000	3	17.796.000	3	17.796.000	3	17.796.000	3	17.796.000	3	17.796.000	3	106.614.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang / Bulan		15	107.400.000	15	107.400.000	15	107.400.000	15	107.400.000	15	107.400.000	15	107.400.000	15	644.400.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.582.500		38.582.500		38.582.500		38.582.500		38.582.500		38.582.500		231.495.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	0	27		27		25		25		25		25		25			

			Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berizin dan terpelihara	Unit	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	1.200.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	60.000.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	15	12.482.500	15	12.482.500	15	12.482.500	15	12.482.500	15	12.482.500	15	12.482.500	15	12.482.500	15	74.895.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	2	15.900.000	2	15.900.000		15.900.000		15.900.000		15.900.000		15.900.000		15.900.000		95.400.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Publik yang tersedia	%		44.026.800		44.026.800		44.026.800		44.026.800		44.026.800		44.026.800		44.026.800		264.160.800	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				44.026.800		44.026.800		44.026.800		44.026.800		44.026.800		44.026.800		44.026.800		264.160.800	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
			Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus	1		1		1		1		1		1		1		1			
			Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100		100		100		100		100		100		100		100			

		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani [Jumlah Monitoring Dan Evaluasi PBB Yang Dilaksanakan]	Kasus [Kegiatan]	24	44.026.800	24	44.026.800	24	44.026.800	24	44.026.800	24	44.026.800	24	44.026.800	24	164.160.800	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%		997.055.000		997.055.000		997.055.000		997.055.000		997.055.000		997.055.000		5.982.330.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				997.055.000		997.055.000		997.055.000		997.055.000		997.055.000		997.055.000		5.982.330.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
			Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	72.000.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	4	4	827.493.100	4	734.185.000	4	734.185.000	4	734.185.000	4	734.185.000	4	734.185.000	4	4.498.418.100	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	157.561.900	50	250.870.000	50	250.870.000	50	250.870.000	50	250.870.000	50	250.870.000	50	1.411.911.900	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
				Jumlah laporan pelaksanaan DTKS	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		1			

				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	5	5		5		5		5		6		6		6				
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	10.000.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					-		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang																		
			Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%			70		70		75		75		80		80					
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	10.000.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%			10.000.000	8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	50.000.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					10.000.000	8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	50.000.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan	

			Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang																	
			Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%																	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan		2	10.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	50.000.000	Kelurahan Pelutan	Kelurahan Pelutan
			KELURAHAN PADURAKSA					1.174.916.900		1.174.916.900		1.174.916.900		1.174.916.900		1.174.916.900		1.174.916.900		7.049.501.400	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					176.940.900		176.940.900		176.940.900		176.940.900		176.940.900		176.940.900		7.049.501.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					68.090.900		68.540.900		68.540.900		68.540.900		68.540.900		68.540.900		411.245.400	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan		4	4		4		4		4		4		4				
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan	%		100	100		100		100		100		100		100				

				layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)																		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis/bulan	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	3.000.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia		4	4	62.190.900	4	62.640.900	4	62.640.900	4	62.640.900	4	62.640.900	4	62.640.900	4	375.845.400	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		4	4	2.520.000	2	2.520.000	4	2.520.000	4	2.520.000	4	2.520.000	4	2.520.000	4	15.120.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang tersedia		2	2	2.880.000	2	2.880.000	2	2.880.000	2	2.880.000	2	2.880.000	2	2.880.000	2	17.280.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					104.050.000		103.600.000		103.600.000		103.600.000		103.600.000		103.600.000		621.600.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
			Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	3	3		3		3		3		3		3		3			
			Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100			

		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	135	100	450.000											450.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Umlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	jenis/bulan	3	3	16.000.000	3	16.000.000	3	16.000.000	3	16.000.000	3	16.000.000	3	16.000.000	3	96.000.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang / Bulan	11	11	87.600.000	11	87.600.000	11	87.600.000	11	87.600.000	11	87.600.000	11	87.600.000	11	525.600.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		28.800.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa	
				Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	8	8		8		8		8		8		8		8			
				Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	Unit	3	3	2.900.000	3	2.900.000	3	2.900.000	3	2.900.000	3	2.900.000	3	2.900.000	3	17.400.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	5	5	1.900.000	5	1.900.000	5	1.900.000	5	1.900.000	5	1.900.000	5	1.900.000	5	11.400.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Publik yang tersedia	%			65.200.000		65.200.000		65.200.000		65.200.000		65.200.000		65.200.000		391.200.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa	

		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				65.200.000		65.200.000		65.200.000		65.200.000		65.200.000		65.200.000		391.200.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus		1		1		1		1		1		1					
			Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%		100		100		100		100		100		100					
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani [Jumlah Monitoring Dan Evaluasi PBB Yang Dilaksanakan]	Kasus [Kegiatan]		24	65.200.000	24	65.200.000	24	65.200.000	24	65.200.000	24	65.200.000	24	65.200.000	24	391.200.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
				Jumlah peserta rakor RT / RW	Orang		50		50		50		50		50		50					
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%		923.276.000		923.276.000		923.276.000		923.276.000		923.276.000		923.276.000		5.539.656.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																			
			Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan		6	9	9		9		9		9		9					
			Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%		100	100	100		100		100		100		100					

		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	50	80	6.750.000	80	6.750.000	80	6.750.000	80	6.750.000	80	6.750.000	80	6.750.000	80	40.500.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	4	4	730.131.000	4	730.131.000	4	730.131.000	4	730.131.000	4	730.131.000	4	730.131.000	4	4.380.786.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	186.395.000	50	186.395.000	50	186.395.000	50	186.395.000	50	186.395.000	50	186.395.000	50	1.118.370.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
				Jumlah laporan pelaksanaan verbal DTKS	Dokumen		1		1		1		1		1		1		1			
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	5	5		5		5		5		6		6		6			
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	10.000.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					-		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
			Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkatkan kapasitasnya	Orang				17		17		19		19		20		20			

			Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%				70		70		75		75		80		80			
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang				25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	10.000.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%			9.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		47.000.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					9.500.000		7.500.000		7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	747.000.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
			Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang																	
			Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%																	

		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan		2	9.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	47.000.000	Kelurahan Paduraksa	Kelurahan Paduraksa
			KELURAHAN SUGIHWARAS					1.297.066.600		1.297.066.600		1.297.066.600		1.297.066.600		1.297.066.600		1.297.066.600		7.782.399.600	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					272.543.600		272.543.600		272.543.600		272.543.600		272.543.600		272.543.600		1.635.261.600	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					93.167.600		93.167.600		93.167.600		93.167.600		93.167.600		93.167.600		559.005.600	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan		3	3		3		3		3		3		3				
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang melancarkan pelaksanaan tugas	%		100	100		100		100		100		100		100				

		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan		7/12	2.997.500	7/12	2.997.500	7/12	2.997.500	7/12	2.997.500	7/12	2.997.500	7/12	2.997.500	7/12	17.985.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	3/12	3/12	80.780.100	3/12	80.780.100	3/12	80.780.100	3/12	80.780.100	3/12	80.780.100	3/12	80.780.100	3/12	484.680.600	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis / Bulan	2/12	2/12	6.990.000	2/12	6.990.000	2/12	6.990.000	2/12	6.990.000	2/12	6.990.000	2/12	6.990.000	2/12	41.940.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang tersedia	Jenis/ bulan	2/12	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	14.400.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					153.636.000		153.636.000		153.636.000		153.636.000		153.636.000		153.636.000		921.816.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
			Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	3	3		3		3		3		3		3		3			
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat		5000	3.636.000	5000	3.636.000	5000	3.636.000	5000	3.636.000	5000	3.636.000	5000	3.636.000	5000	21.816.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis / Bulan		4/12	13.800.000	4/12	13.800.000	4/12	13.800.000	4/12	13.800.000	4/12	13.800.000	4/12	13.800.000	4/12	82.800.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras

		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang / Bulan		15/12	136.200.000	15/12	136.200.000	15/12	136.200.000	15/12	136.200.000	15/12	136.200.000	15/12	136.200.000	15/12	817.200.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.740.000		25.740.000		25.740.000		25.740.000		25.740.000		25.740.000		154.440.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		14		14		14		14		14		14		14			
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berizin dan terpelihara	Unit		2	6.060.000	2	6.060.000	2	6.060.000	2	6.060.000	2	6.060.000	2	6.060.000	2	36.360.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit		11	8.300.000	11	8.300.000	11	8.300.000	11	8.300.000	11	8.300.000	11	8.300.000	11	49.800.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit		1	11.380.000	1	11.380.000	1	11.380.000	1	11.380.000	1	11.380.000	1	11.380.000	1	68.280.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Publik yang tersedia	%			26.904.000		26.904.000		26.904.000		26.904.000		26.904.000		26.904.000		161.424.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras

		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				26.904.000		26.904.000		26.904.000		26.904.000		26.904.000		26.904.000		161.424.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus		1		1		1		1		1		1		1			
			Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%		100		100		100		100		100		100		100			
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani [Jumlah Monitoring Dan Evaluasi PBB Yang Dilaksanakan]	Kasus [Kegiatan]		24	26.904.000	24	26.904.000	24	26.904.000	24	26.904.000	24	26.904.000	24	26.904.000	24	161.424.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%		989.899.000		989.899.000		989.899.000		989.899.000		989.899.000		989.899.000		5.939.394.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				989.899.000		989.899.000		989.899.000		989.899.000		989.899.000		989.899.000		5.939.394.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	14	18		18		18		18		18		18		18			
			Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		100		100			

		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	6.495.000	100	6.495.000	100	6.495.000	100	6.495.000	100	6.495.000	100	6.495.000	100	38.970.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	10	10	615.549.000	10	615.549.000	4	615.549.000	4	615.549.000	4	615.549.000	4	615.549.000	4	3.693.294.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	367.855.000	50	367.855.000	50	367.855.000	50	367.855.000	50	367.855.000	50	367.855.000	50	2.207.130.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras	
				Jumlah laporan pelaksanaan verbal DTKS	Dokumen		1		1		1		1		1		1		1				
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga		5		5		5		5		6		6		6				
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	10.000.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					-		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras	
				Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang				17		17		19		19		20		20			

			Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%			70		70		75		75		80		80			
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	10.000.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%		7.720.000		5.720.000		5.720.000		5.720.000		5.720.000		5.720.000		36.320.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				7.720.000		5.720.000		5.720.000		5.720.000		5.720.000		5.720.000		36.320.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
			Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang																
			Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%																

		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laoran kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	7.720.000	2	5.720.000	2	5.720.000	2	5.720.000	2	5.720.000	2	5.720.000	2	36.320.000	Kelurahan Sugihwaras	Kelurahan Sugihwaras
			KELURAHAN MULYOHARJO					1.367.504.700		1.367.504.700		1.367.504.700		1.367.504.700		1.367.504.700		1.367.504.700		8.205.028.200	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					348.387.700		348.387.700		348.387.700		348.387.700		348.387.700		348.387.700		2.090.326.200	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					129.317.700		129.317.700		129.317.700		129.317.700		129.317.700		129.317.700		775.906.200	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan)	5	5		5		5		5		5		5		5			
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100			

		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	Jenis / Bulan		6/12	2.700.000	6/12	2.700.000	6/12	2.700.000	6/12	2.700.000	6/12	2.700.000	6/12	2.700.000	6/12	16.200.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo				
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	3/12	3/12	96.217.700	3/12	96.217.700	3/12	96.217.700	3/12	96.217.700	3/12	96.217.700	3/12	96.217.700	3/12	577.306.200	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo				
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis / Bulan	2/12	2/12	11.000.000	2/12	11.000.000	2/12	11.000.000	2/12	11.000.000	2/12	11.000.000	2/12	11.000.000	2/12	66.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo				
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Lembar		11600		12000		12000		12000		12000		12000		12000					12000		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang tersedia		2/12	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	14.400.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo				
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kegiatan		2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	102.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo				
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		60.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo				
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit		6		21		21		21		21		21		21							
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100							
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit		21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	60.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo				

		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.320.000		177.320.000		177.320.000		177.320.000		177.320.000		177.320.000		1.063.920.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa		3		3		3		3		3		3					
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100					
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat		500	2.000.000	500	2.000.000	500	2.000.000	500	2.000.000	500	2.000.000	500	2.000.000	500	12.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis / Bulan		4/12	38.520.000	4/12	38.520.000	4/12	38.520.000	4/12	38.520.000	4/12	38.520.000	4/12	38.520.000	4/12	231.120.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan		5/12	3.600.000	5/12	3.600.000	5/12	3.600.000	5/12	3.600.000	5/12	3.600.000	5/12	3.600.000	5/12	21.600.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang / Bulan		15/8	133.200.000	15/8	133.200.000	15/8	133.200.000	15/8	133.200.000	15/8	133.200.000	15/8	133.200.000	15/8	799.200.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31.750.000		31.750.000		31.750.000		31.750.000		31.750.000		31.750.000		190.500.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		6		6		6		6		6		6					

			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100				
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berizin dan terpelihara	Unit		5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	45.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit		1	24.250.000	1	24.250.000	1	24.250.000	1	24.250.000	1	24.250.000	1	24.250.000	1	145.500.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%			1.002.117.000		1.002.117.000		1.002.117.000		1.002.117.000		1.002.117.000		1.002.117.000		6.012.702.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.002.117.000		1.002.117.000		1.002.117.000		1.002.117.000		1.002.117.000		1.002.117.000		6.012.702.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	10	11		11		11		11		11		11		11				
			Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		100		100				
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	12.750.000	100	12.750.000	100	12.750.000	100	12.750.000	100	12.750.000	100	12.750.000	100	76.500.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo	

		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	5	3	640.367.000	3	640.367.000	3	640.367.000	3	640.367.000	3	640.367.000	3	640.367.000	3	3.842.202.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	349.000.000	50	349.000.000	50	349.000.000	50	349.000.000	50	349.000.000	50	349.000.000	50	2.094.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
				Jumlah laporan pelaksanaan verwal DTKS	Dokumen		1		1		1		1		1		1		1			
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga		5		5		5		5		6		6		6			
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	10.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					-		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
			Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang				17		17		19		19		20		20			
			Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%				70		70		75		75		80		80			

		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	10.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%			17.000.000	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		92.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					17.000.000	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		92.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo
			Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang																
			Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%																
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	17.000.000	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	92.000.000	Kelurahan Mulyoharjo	Kelurahan Mulyoharjo

			KELURAHAN WIDURI					1.245.737.800		1.245.737.800		1.245.737.800		1.245.737.800		1.245.737.800		1.245.737.800		7.474.426.800	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					247.045.800		247.045.800		247.045.800		247.045.800		247.045.800		247.045.800		1.482.274.800	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					110.620.000		110.620.000		110.620.000		110.620.000		110.620.000		110.620.000		663.720.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	6	6		6		6		6		6		6		6				
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang melancarkan pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100				
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	10	10/12	2.000.000	10/12	2.000.000	10/12	2.000.000	10/12	2.000.000	10/12	2.000.000	10/12	2.000.000	10/12	12.000.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	3	3/12	44.388.000	3/12	44.388.000	3/12	44.388.000	3/12	44.388.000	3/12	44.388.000	3/12	44.388.000	3/12	266.328.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis / Bulan	1	1/12	5.512.000	1/12	5.512.000	1/12	5.512.000	1/12	5.512.000	1/12	5.512.000	1/12	5.512.000	1/12	33.072.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri	
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Lembar	7.824	7.824		7.824		7.824		7.824		7.824		7.824		7.824				

		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang tersedia		2/12	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	2.400.000	2/12	14.400.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Yang difasilitasi	Orang	50	50	3.050.000	50	3.050.000	50	3.050.000	50	3.050.000	50	3.050.000	50	3.050.000	50	18.300.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kegiatan	25	25	53.270.000	25	53.270.000	25	53.270.000	25	53.270.000	25	53.270.000	25	53.270.000	25	319.620.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					127.800.000		127.800.000			127.800.000		127.800.000			127.800.000		766.800.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
			Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa		3		3		3		3		3			3				
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100			100				
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat		350	900.000	350	900.000	350	900.000	350	900.000	350	900.000	350	900.000	350	5.400.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis / Bulan		4/12	12.900.000	4/12	12.900.000	4/12	12.900.000	4/12	12.900.000	4/12	12.900.000	4/12	12.900.000	4/12	77.400.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang / Bulan		13/9	114.000.000	13/9	114.000.000	13/9	114.000.000	13/9	114.000.000	13/9	114.000.000	13/9	114.000.000	13/9	684.000.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.625.800		8.625.800			8.625.800		8.625.800			8.625.800		51.754.800	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri

			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berizin dan terpelihara	Unit	2	3.625.800	2	3.625.800	2	3.625.800	2	3.625.800	2	3.625.800	2	3.625.800	2	21.754.800	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	30.000.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%		985.492.000		985.492.000		985.492.000		985.492.000		985.492.000		985.492.000		5.912.952.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				985.492.000		985.492.000		985.492.000		985.492.000		985.492.000		985.492.000		5.912.952.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
			Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	12.447.000	100	12.447.000	100	12.447.000	100	12.447.000	100	12.447.000	100	12.447.000	100	74.682.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri

		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	6	5	725.000.000	5	725.000.000	5	725.000.000	5	725.000.000	5	725.000.000	5	725.000.000	5	4.350.000.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	248.045.000	50	248.045.000	50	248.045.000	50	248.045.000	50	248.045.000	50	248.045.000	50	1.488.270.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
				Jumlah laporan pelaksanaan verwal DTKS	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		1			
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibangun	Lembaga	5	5		5		5		5		6		6		6			
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	10.000.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					-		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
			Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang				17		17		19		19		20		20			
			Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%				70		70		75		75		80		80			

		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	10.000.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%			13.200.000	11.200.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000		69.200.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					13.200.000	11.200.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000		69.200.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
			Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang																
			Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%																

		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	13.200.000	2	11.200.000	2	11.200.000	2	11.200.000	2	11.200.000	2	11.200.000	2	69.200.000	Kelurahan Widuri	Kelurahan Widuri
			KELURAHAN BOJONGBATA					1.257.819.400		1.257.819.400		1.257.819.400		1.257.819.400		1.257.819.400		1.257.819.400		7.547.510.400	Kelurahan Bojongbata	Kelurahan Bojongbata
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					284.712.400		284.712.400		284.712.400		284.712.400		284.712.400		284.712.400		1.708.274.400	Kelurahan Bojongbata	Kelurahan Bojongbata
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					123.500.400		123.500.400		123.500.400		123.500.400		123.500.400		123.500.400		741.002.400	Kelurahan Bojongbata	Kelurahan Bojongbata
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan	3	3		3		3		3		3		3		3			
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100			

		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	6/12	6/12	7.500.000	6/12	7.500.000	6/12	7.500.000	6/12	7.500.000	6/12	7.500.000	6/12	7.500.000	6/12	45.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Unit	6/12	6/12	10.000.000	6/12	10.000.000	6/12	10.000.000	6/12	10.000.000	6/12	10.000.000	6/12	10.000.000	6/12	60.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	4/12	4/12	40.000.400	4/12	40.000.400	4/12	40.000.400	4/12	40.000.400	4/12	40.000.400	4/12	40.000.400	4/12	240.002.400	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis / Bulan	2/12	2/12	21.000.000	2/12	21.000.000	2/12	21.000.000	2/12	21.000.000	2/12	21.000.000	2/12	21.000.000	2/12	126.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat		
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Lembar	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500					
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kegiatan		4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	270.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		102.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat		
				Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit		2			2		2		2		2		2					2
				Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100					100	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit		2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	102.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat		

		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				144.212.000		144.212.000		144.212.000		144.212.000		144.212.000		144.212.000		865.272.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa		2		2		2		2		2		2					
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100					
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis / Bulan		3/12	36.000.000	3/12	36.000.000	3/12	36.000.000	3/12	36.000.000	3/12	36.000.000	3/12	36.000.000	3/12	216.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang / Bulan		15/12	108.212.000	15/12	108.212.000	15/12	108.212.000	15/12	108.212.000	15/12	108.212.000	15/12	108.212.000	15/12	649.272.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%		948.107.000		948.107.000		948.107.000		948.107.000		948.107.000		948.107.000		5.688.642.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				948.107.000		948.107.000		948.107.000		948.107.000		948.107.000		948.107.000		5.688.642.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	10	13		13		13		13		13		13					
			Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		100					

		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	60.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	6	8	715.107.000	8	715.107.000	8	715.107.000	8	715.107.000	8	715.107.000	8	715.107.000	8	4.290.642.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	223.000.000	50	223.000.000	50	223.000.000	50	223.000.000	50	223.000.000	50	223.000.000	50	1.338.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat	
			Jumlah laporan pelaksanaan verval DTKS	Dokumen		1		1		1		1		1		1		1					
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga		5		5		5		5		6		6		6					
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	10.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					-		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbat	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang				17		17		19		19		20		20				

			Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%			70		70		75		75		80		80				
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	2.000.000	25	10.000.000	Kelurahan Bojongbat	Kelurahan Bojongbata	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%			25.000.000	23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		140.000.000	Kelurahan Bojongbata	Kelurahan Bojongbata	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					25.000.000	23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		140.000.000	Kelurahan Bojongbata	Kelurahan Bojongbata	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang																	
			Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%		100		100		100		100		100		100					

		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	25.000.000	2	23.000.000	2	23.000.000	2	23.000.000	2	23.000.000	2	23.000.000	2	140.000.000	Kelurahan Bojongbatara	Kelurahan Bojongbata
--	--	-----------------	--	--	----------	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	-------------	------------------------	----------------------

Kecamatan Pemalang sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Pemalang tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah.

Tabel 6.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang
Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 6.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 6.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 6.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Dalam rangka pengembangan SDM untuk mendukung kelancaran pelayanan kinerja, Kecamatan Pemalang telah menyusun Rencana Aksi Daerah Sumber Daya Manusia (RAD SDM) sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 6.6
RAD SDMKecamatan Pemalang Tahun 2021-2026

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
				Target	Anggaran (Rp)	Peserta															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Urusan Wajib Layanan Dasar																				
1.5	Bidang Trantibumlinmas																				
Pelatihan Linmas	Jumlah peserta pelatihan	Orang	40	14.296.000	Anggota Linmas Desa / Kel	40	5.000.000	Anggota Linmas Desa / Kel	40	5.000.000	Anggota Linmas Desa / Kel	40	5.000.000	Anggota Linmas Desa / Kel	40	5.000.000	Anggota Linmas Desa / Kel	40	5.000.000	Anggota Linmas Desa / Kel
Pelatihan tanggap bencana	Jumlah peserta pelatihan	Orang	40	14.296.000	Anggota Linmas Desa / Kel															
1.6	Bidang Sosial																				
Pemutakhiran DTKS	Sosialisasi DTKS	Orang	20		Aparat Desa / Kel															
2	URUSAN WAJIB NON LAYANAN DASAR																				
2.7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa																				
Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan desa (2 kali)	Orang	26	12.995.000	Perangkat desa	26	12.995.000	Perangkat desa												
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Urtug Kades & Perangkat Desa	orang	26	5.070.000	Perangkat desa															
Peningkatan Kapasitas BPD	Jumlah peserta pembinaan Uraian Tugas dan Fungsi BPD	orang	26	6.000.000	Anggota BPD															
B	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Penyelenggara Perangkat Daerah Penunjang																				
2	Bidang Keuangan Daerah																				
 Perbendaharaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi/pembekalan	orang										25	10.249.000	Perangkat Kel dan						

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
				Target	Anggaran (Rp)	Peserta	Target	Anggaran (Rp)	Peserta	Target	Anggaran (Rp)	Peserta	Target	Anggaran (Rp)	Peserta	Target	Anggaran (Rp)	Peserta	Target	Anggaran (Rp)	Peserta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		perbendaharaan keuangan daerah													Kecc						
 Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi/pembekalan penganggaran dan penatausahaan keuangan	orang	25	13.234.900	Perangkat Kel dan Kecc	25	10.249.000	Perangkat Kel dan Kecc							25	10.249.000	Perangkat Kel dan Kecc	25	10.249.000	Perangkat Kel dan Kecc
 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta sosialisasi/pembekalan pengelolaan BMD	orang							25	10.249.000	Perangkat Kel dan Kecc									
4	Bidang Hukum/Peraturan																				
 Sosialisasi Produk Hukum	Sosialisasi Produk Hukum (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan DD dan ADD)	orang	26			26			26			26			26			26		
		Sosialisasi Produk Hukum (Perda)	orang	20			20			20			20			20			20		
6	Bidang Umum																				
 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	Bimbingan SIRUP	orang	18	11.765.100	Perangkat Kel dan Kec															
C	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum																				
 Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	orang				20	3.330.000	Toma / pemuda	20	3.330.000	Toma / pemuda	20	3.330.000	Toma / pemuda	20	3.330.000	Toma / pemuda	20	3.330.000	Toma / pemuda

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Pemalang

yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang
 Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	83,36	83,4	83,45	83,5	83,55	83,6	83,65	83,65
2	Cakupan layanan kecamatan (%)	%	86,99	86,99	88,53	88,53	90,07	90,07	91,61	91,61

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kecamatan Pemalang yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	KECAMATAN PEMALANG											
A	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	83,36	83,4	83,45	83,5	83,55	83,6	83,65	83,65	Kepala
		Cakupan layanan kecamatan (%)	%	86,99	86,99	88,53	88,53	90,07	90,07	91,61	91,61	
I	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,15	58,3	58,5	58,6	58,7	58,8	58,9	58,9	Sekretaris
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	36,73	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40	

a	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Sekcam
	Keluaran kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	10	11	20	20	20	20	20	20	
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100								
1	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4	3	3	2	2	3	2	2	Kasubag Binprokeu
2	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu
3	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu

4	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu
5	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu
6	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Dokumen	1	4	4	4	4	4	4	4	Kasubag Binprokeu
7	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	3	12	12	12	12	12	12	Kasubag Binprokeu
b	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1								
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100								

1	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang / Bulan	103/12	103/12	103/12	103/12	103/12	103/12	103/12	103/12	103/12	Kasubag Binprokeu
2	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu
c	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	Dokumen		4								
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	%		100								
1	7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang Tersusun	Dokumen		2	2	2	2	2	2	2	2	Kasubag Umpeg

2	7.01.01.2.03.06 Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun	Dokumen		2	2	2	2	2	2	2	Kasubag Umpeg
d	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Orang		0	25	25	25	25	25	25	
	Hasil Kegiatan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%			100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang / Kegiatan			25/1	25/1	25/1	25/1	25/1	25/1	Kasubag Umpeg
e	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	4	8	8	8	8	8	8	8	

	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan		8/12	8/12	8/12	8/12	10/12	10/12	10/12	Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Unit		10	2	2	2	2	2	2	Kasubag Umpeg
3	7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis / Bulan		16	2	2	2	2	2	2	Kasubag Umpeg
4	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis / Bulan		3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Kasubag Umpeg
5	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis / Bulan	2	2	2	2	2	2	2	2	Kasubag Umpeg
		Jumlah penggandaan yang tersedia	Lembar	45.000	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220	
6	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis / Bulan	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	Kasubag Umpeg

7	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	Kegiatan	5	15	15	15	15	15	15	15	Kasubag Umpeg
8	7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata	Jenis		2	2	2	2	2	2	2	
f	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7	11	38	11	38	38	Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit		13	7	11	38	11	38	38	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
1	7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang tersedia	Unit		1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit			3	3	30	3	30	30	
3	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	9	9	2	4	4	4	4	4	Kasubag Umpeg

4	7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	Unit	1	3	1	3	3	3	3	3	Kasubag Umpeg
5	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	Unit			1	2	2	2	2	2	Kasubag Umpeg
g	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3	3	3	3	3	3	Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	2	3							
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
1	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	850	900	900	900	900	900	900	900	Kasubag Umpeg

2	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar tiap bulan	Jenis / Bulan	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Kasubag Umpeg
4	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang / Bulan	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	Kasubag Umpeg
h	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					79	80	80	82	83	83	Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	36	39	79	80	80	82	83	83	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
1	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berijin dan terpelihara	Unit	12	12	12	13	14	15	16	16	Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit			40	40	40	40	40	40	Kasubag Umpeg

3	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	20	23	23	23	23	23	23	23	23	Kasubag Umpeg
4	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Kasubag Umpeg
5	7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	1	1	1	1		1	1	1	1	Kasubag Umpeg
II	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	71,67	73,33	75	76,67	78,33	80	81,67	81,67	81,67	Camat
a	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1	1	1	1	1	1	1	1	Sekcam
	Keluaran Kegiatan	jenis data pemerintahan yang dipublikasikan	Data	2	3	3	4	4	5	5	5		
	Hasil Kegiatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	40	60	60	80	80	100	100	100		

1	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang tersedia	Data	3	6	6	6	6	6	6	6	Kasi Pemerintahan
b	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus	3								
	Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100								
1	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	Peraturan			1	1	1	1	1	1	Kasi Pelayanan
2	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	Layanan			1	1	1	1	1	1	Kasi Pelayanan
3	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	Kasus	3	3	3	3	3	3	3	3	Kasi Trantib

c	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kewenangan	13	13	14	14	15	15	16	16	
	Hasil Kegiatan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	43,33	43,33	46,67	46,67	50	50	53,33	53,33	
1	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	Izin	29	25	26	27	28	29	29	29	Kasi Pelayanan
2	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasi Pelayanan
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	Surat	3674	3675	3680	3685	3690	3695	3700	3700	
3	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia	Kewenangan			2	2	2	2	2	2	

III	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	100	Camat								
a	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			2	4	Sekcam							
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa / Kel + Kec)	Orang	120									
	Hasil Kegiatan	Persentase kehadiran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa / Kel + Kec)	%	100									
1	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Orang			25/1	25/1	25/1	25/1	25/1	25/1	25/1	

2	7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Orang	120/1	120/1	120/1	120/1	120/1	120/1	120/1	120/1	Kasi PMD
3	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbangkab yang didampingi	Desa / Kelurahan	2	4	4	4	4	4	4	4	Kasi PMD
c	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang aktif	Lembaga	3	3	4	4	5	5	6	6	
	Hasil Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	%	50	50	66,67	66,67	83,33	83,33	100	100	
1	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	Lembaga	3	3	4	4	5	5	6	6	Kasi PMD

2	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Orang			40	40	40	40	40	40	
IV	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100	100	100	100	100	100	100	Camat
a	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang			30	31	32	33	33	33	
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%			75	77,5	80	82,5	82,5	82,5	
1	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang		40	40	40	40	40	40	40	Kasi Trantib

b	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	Peraturan		2	2	2	3	3	3	3	
	Hasil Kegiatan	Persentase Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	%		75	76	77	78	79	80	80	
1	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbub yang dimonitoring	Peraturan		2/4	Kasi Trantib						
V	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%		100	Camat						
a	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Sekcam

	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Orang		30	30	31	31	32	32	32	
	Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%		75	75	77,5	77,5	80	80	80	
1	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	Kasi Trantib
2	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	Orang		40	20	20	20	20	20	20	Kasi Trantib

3	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	Kasus	0	2	2	2	2	2	2	2	Kasi Trantib
4	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	Tema	6	6	6	6	6	6	6	6	Kasi Pemerintahan
VI	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	53,84	53,84	61,53	61,53	69,23	69,23	76,92	76,92	Camat
a	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	Desa	7	7	8	8	9	9	10	10	
	Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%	100								

1	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa / Kegiatan	13/4	13/4	13/4	13/4	13/4	13/4	13/4	13/4	13/4	Kasi Pemerintahan
2	7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	Desa / Kegiatan	13/3	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	Kasi Pemerintahan
3	7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa / Kegiatan	13/4	13/6	13/6	13/6	13/6	13/6	13/6	13/6	13/6	Kasi PMD
4	7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Orang / Kegiatan		26/2	26/2	26/2	26/2	26/2	26/2	26/2	26/2	Kasi Pemerintahan
5	7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	Desa					12		1	1		Kasi Pemerintahan
6	7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Orang / Kegiatan		26/1	26/1	26/1	26/1	26/1	26/1	26/1	26/1	Kasi Pemerintahan

7	7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	Surat		4	4	4	4	4	4	4	Kasi Pemerintahan
8	7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	Desa / Kegiatan	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	Kasi Pemerintahan
9	7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Linmas	Orang	44	44							
10	7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	Desa / Kegiatan		13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	Kasi PMD
11	7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	Orang / Kegiatan		26/1	26/1	26/1	26/1	26/1	26/1	26/1	Kasi PMD
B	KELURAHAN KEBONDALEM											

I	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											Sekretaris
b	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
1	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	SEKLUR
3	7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	SEKLUR
4	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	4	4	4	4	4	4	4	4	SEKLUR

5	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis / Bulan	5	4	4	4	4	4	4	4	SEKLUR
		Jumlah penggandaan yang tersedia	Lembar	26544	15.007	15.007	15.007	15.007	15.007	15.007	15.007	SEKLUR
6	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis / Bulan	2	2	2	2	2	2	2	2	SEKLUR
c	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	3	6							
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
2	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit		4	4	4	4	4	4	4	SEKLUR
3	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit		2	2	2	2	2	2	2	SEKLUR
d	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah

	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
2	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Rekening / Bulan		3	3	3	3	3	3	3	SEKLUR
4	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang / Bulan		13	13	13	13	13	13	13	SEKLUR
e	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	2	14	16	16	16	16	16	16	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							

1	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit		2	4	4	4	4	4	4	SEKLUR
3	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit		10	10	10	10	10	10	10	SEKLUR
4	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	SEKLUR
II	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Publik yang tersedia	%									
a	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus		1							
	Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%		100							

1	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani [Jumlah Monitoring Dan Evaluasi PBB Yang Dilaksanakan]	Kasus [Kegiatan]		24	24	24	24	24	24	24	Kasi Trantib Kasi Pem
III	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%									
a	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	11	15							
	Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100								
1	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	kasi ekbang
2	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	4	5	5	5	5	5	5	5	kasi ekbang

3	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	50	50	50	50	50	50	kasi ekbang Kasi trantib Kasi Pem
		Jumlah laporan pelaksanaan verbal DTKS	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	5	5	5	5	5	6	6	6	
IV	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100							
a	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang			17	17	19	19	20	20	
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%			70	70	75	75	80	80	

1	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	25	25	25	25	25	Kasi Trantib
V	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%									
a	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional										
	Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%									

1	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	kasi trantib
C	KELURAHAN PELUTAN												
I	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												Sekretaris
b	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah												Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	6									

	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	10	10	10	10	10	10	10	10	SEKLUR
2	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Unit	11	11	5	7	10	7	10	10	
4	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	4	4	4	4	4	4	4	4	SEKLUR
5	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis / Bulan	3	3	3	3	3	3	3	3	SEKLUR
6	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis / Bulan	2	2	2	2	2	2	2	2	SEKLUR
7	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kegiatan		3	3	3	3	3	3	3	
c	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Lurah

	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit		1							
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
3	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit		3	3	3	3	3	3	3	SEKLUR
d	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jasa	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
1	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	Surat		400	400	400	400	400	400	400	

2	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar	Rekening / Bulan		3	3	3	3	3	3	3	SEKLUR
4	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar	Orang / Bulan		15	15	15	15	15	15	15	SEKLUR
e	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	0	27	27	25	25	25	25	25	
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
1	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	Unit		5	5	5	5	5	5	5	SEKLUR
2	7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit		5	5	5	5	5	5	5	
3	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		15	15	15	15	15	15	15	SEKLUR

4	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara	Unit		2	2							SEKLUR
II	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Publik yang tersedia	%										
a	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus		1								
	Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%		100								
1	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani [Jumlah Monitoring Dan Evaluasi PBB Yang Dilaksanakan]	Kasus [Kegiatan]		24	24	24	24	24	24	24	24	Kasi Pem'an

III	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%									
a	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	9								
	Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100								
1	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	kasi ekbang Kasi trantib Kasi Pem
2	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	4	4	4	4	4	4	4	4	kasi ekbang Kasi trantib Kasi Pem
3	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	50	50	50	50	50	50	kasi ekbang Kasi trantib Kasi Pem

		Jumlah laporan pelaksanaan verval DTKS	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	5	5	5	5	5	6	6	6	
IV	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100	100	100	100	100	100	100	
a	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang									
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%			70	70	75	75	80	80	
1	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	25	25	25	25	25	Kasi Trantib

V	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%									
a	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah konflik sosial yang tertangani	Kasus									
	Hasil Kegiatan	Persentase konflik sosial yang tertangani	%									
1	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan		2	2	2	2	2	2	2	kasi trantib
D	KELURAHAN PADURAKSA											

I	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											Sekretaris
b	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan	4								
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100								
1	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli		1	1	1	1	1	1	1	1	Seklur
4	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan		4	4	4	4	4	4	4	4	Seklur
5	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		4	4	2	4	4	4	4	4	Seklur

6	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan		2	2	2	2	2	2	2	2	Seklur
d	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Seklur
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jasa	3								
	Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100								
1	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	135	100							Seklur
2	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar	Rekening / Bulan	3	3	3	3	3	3	3	3	Seklur
4	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar	Orang / Bulan	11	11	11	11	11	11	11	11	Seklur
e	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah

	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	Seklur
3	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	Seklur
II	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Publik yang tersedia	%									
a	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus		1	1	1	1	1	1	1	

	Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%		100							
1	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani [Jumlah Monitoring Dan Evaluasi PBB Yang Dilaksanakan]	Kasus [Kegiatan]		24	24	24	24	24	24	24	Kasi Pem'an
		Jumlah peserta rakor RT / RW	Orang		50	50	50	50	50	50	50	
III	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%									
a	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	6	9							
	Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100								

1	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	kasi ekbang
2	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	kasi ekbang
3	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	kasi ekbang
		Jumlah laporan pelaksanaan verbal DTKS	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	5	5	5	5	5	6	6	6		
IV	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100								
a	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												Lurah

	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang			17	17	19	19	20	20	
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%			70	70	75	75	80	80	
1	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	25	25	25	25	25	Kasi Trantib
V	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%									
a	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	0	0	0	
	Keluaran Kegiatan	Jumlah konflik sosial yang tertangani	Kasus									
	Hasil Kegiatan	Persentase konflik sosial yang tertangani	%									

1	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan		2	2	2	2	2	2	2	kasi trantib
E	KELURAHAN SUGIHWARAS											
I	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											Sekretaris
b	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	layanan	3								

	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	Jenis / Bulan		7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	Seklur
4	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis / Bulan	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Seklur
5	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis / Bulan	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	Seklur
6	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan		2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	Seklur
d	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jasa	3								

	Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100								
1	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	Surat		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	Seklur
2	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar	Rekening / Bulan		4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	Seklur
4	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar	Orang / Bulan		15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	Seklur
e	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		14							
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
1	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	Unit		2	2	2	2	2	2	2	Seklur

3	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		11	11	11	11	11	11	11	Seklur
5	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara	Unit		1	1	1	1	1	1	1	
II	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Publik yang tersedia	%									
a	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus		1							
	Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%		100							

1	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani [Jumlah Monitoring Dan Evaluasi PBB Yang Dilaksanakan]	Kasus [Kegiatan]		24	24	24	24	24	24	24	Kasi Trantib Kasi Pem
III	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%									
a	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	14	18							
	Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100								
1	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	kasi ekbang
2	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	10	10	10	4	4	4	4	4	kasi ekbang

3	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	50	50	50	50	50	50	kasi ekbang Kasi trantib Kasi Pem	
		Jumlah laporan pelaksanaan verbal DTKS	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1		
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga		5	5	5	5	6	6	6		
IV	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100								
a	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Lurah	
		Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang			17	17	19	19	20		20
		Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%			70	70	75	75	80		80

1	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	25	25	25	25	25	Kasi Trantib
V	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%									
a	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah konflik sosial yang tertangani	Kasus									
	Hasil Kegiatan	Persentase konflik sosial yang tertangani	%									

1	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	kasi trantib
F	KELURAHAN MUYOHARJO												
I	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												Sekretaris
b	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah												Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	layanan	5									

	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	Jenis / Bulan		6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	Seklur
4	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis / Bulan	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Seklur
5	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis / Bulan	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	Seklur
		Jumlah penggandaan yang disediakan	Lembar		11600	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
6	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan		2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	Seklur
7	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kegiatan		2	2	2	2	2	2	2	
c	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Lurah

	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit		6	21	21	21	21	21	21	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
2	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	Unit		21	21	21	21	21	21	21	
d	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jasa		3							
	Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
1	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	Surat		500	500	500	500	500	500	500	Seklur

2	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar	Rekening / Bulan		4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	Seklur
3	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Jenis / Bulan		5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	
4	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar	Orang / Bulan		15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	Seklur
e	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		6							
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
1	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	Unit		5	5	5	5	5	5	5	Seklur
4	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara	Unit		1	1	1	1	1	1	1	

III	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%									
a	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	10	11							
	Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100								
1	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	kasi ekbang
2	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	5	3	3	3	3	3	3	3	kasi ekbang
3	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	50	50	50	50	50	50	kasi ekbang Kasi trantib Kasi Pem
		Jumlah laporan pelaksanaan verwal DTKS	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	

		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga		5	5	5	5	6	6	6	
IV	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100	100	100	100	100	100	100	
a	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang			17	17	19	19	20	20	
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%			70	70	75	75	80	80	
1	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	25	25	25	25	25	Kasi Trantib

V	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%									
a	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah konflik sosial yang tertangani	Kasus									
	Hasil Kegiatan	Persentase konflik sosial yang tertangani	%									
1	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	kasi trantib
G	KELURAHAN WIDURI											

I	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											Sekretaris
b	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	layanan	6								
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100								
1	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	Jenis / Bulan	10	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	Seklur
4	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis / Bulan	3	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Seklur
5	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis / Bulan	1	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	Seklur

		Jumlah penggandaan yang disediakan	Lembar	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	
6	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan		2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	Seklur
7	7.01.01.2.06.08 Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Yang difasilitasi	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	
8	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kegiatan	25	25	25	25	25	25	25	25	
d	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jasa		3							
	Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
1	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	Surat		350	350	350	350	350	350	350	Seklur

2	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar	Rekening / Bulan		4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	Seklur
4	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar	Orang / Bulan		13/9	13/9	13/9	13/9	13/9	13/9	13/9	13/9	Seklur
e	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		7								
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100								
1	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	Unit		2	2	2	2	2	2	2	2	Seklur
3	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		5	5	5	5	5	5	5	5	Seklur

III	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%									
a	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	12	11							
	Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100								
1	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	kasi ekbang
2	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	6	5	5	5	5	5	5	5	kasi ekbang
3	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	50	50	50	50	50	50	kasi ekbang Kasi trantib Kasi Pem

		Jumlah laporan pelaksanaan verval DTKS	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	5	5	5	5	5	6	6	6	
IV	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100							
a	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang			17	17	19	19	20	20	
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%			70	70	75	75	80	80	

1	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	25	25	25	25	25	Kasi Trantib
V	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%									
a	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah konflik sosial yang tertangani	Kasus									
	Hasil Kegiatan	Persentase konflik sosial yang tertangani	%									

1	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	kasi trantib
H	KELURAHAN BOJONGBATA												
I	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												Sekretaris
b	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah												Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	layanan	3									

	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	Jenis / Bulan	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	Seklur
2	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	
4	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis / Bulan	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	Seklur
5	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis / Bulan	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	Seklur
		Jumlah penggandaan yang disediakan	Lembar	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
8	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kegiatan		4	4	4	4	4	4	4	
c	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Lurah

	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit		1							
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							
3	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Unit		2	2	2	2	2	2	2	
d	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jasa		2							
	Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100							

2	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar	Rekening / Bulan		3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Seklur
4	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar	Orang / Bulan		15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	Seklur
III	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%									
a	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	Kegiatan	10	13							
	Hasil Kegiatan	Persentase kegiatan dari dana kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan	%	100								
1	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	kasi ekbang
2	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dari dana kelurahan	Unit	6	8	8	8	8	8	8	8	kasi ekbang

3	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari dana kelurahan	Orang / Kegiatan	50	50	50	50	50	50	50	50	kasi ekbang Kasi trantib Kasi Pem	
		Jumlah laporan pelaksanaan verbal DTKS	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1		
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga		5	5	5	5	6	6	6		
IV	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%		100								
a	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Lurah	
		Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang			17	17	19	19	20		20
		Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%			70	70	75	75	80		80

1	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang			25	25	25	25	25	25	Kasi Trantib
V	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%									
a	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Lurah
	Keluaran Kegiatan	Jumlah konflik sosial yang tertangani	Kasus									
	Hasil Kegiatan	Persentase konflik sosial yang tertangani	%		100	100	100	100	100	100	100	

1	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	kasi trantib
---	---	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

BAB VIII

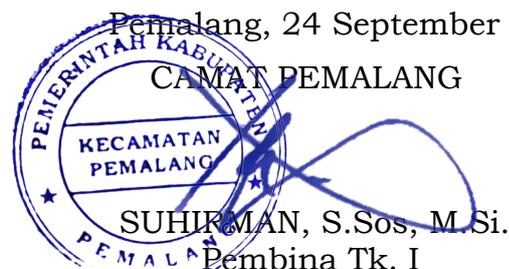
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2021-2026 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Pemalang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Pemalang. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Pemalang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan/atau target kinerja sasaran Kecamatan Pemalang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Pemalang. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Pemalang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Pemalang ini.

Pemalang, 24 September 2021



NIP. 19671213 199803 1 005